

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK
PEREMPUAN DI DESA TOAPAYA SELATAN KECAMATAN TOAPAYA
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Bidang Ilmu Pemerintahan**



OLEH

BAYU TRIE SYAHPUTRI

NIM.110565201074

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG**

2016

ABSTRAK

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan Nasional dari dulu hingga sekarang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dirancang dan dilaksanakan. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di perdesaan. Program kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) berfungsi sebagai kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok.

Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Desa Topaya Selatan yaitu program kegiatan SPP pelaksanaannya telah terlembagakan secara administratif dapat dinilai berhasil sedangkan keberdayaan dan pengawasan dalam pengembangan usaha belum berhasil.

Dilihat dari efektifitas operasional program sudah berjalan baik, efisiensi pengawasan pendampingan dan pembinaan dinilai belum berhasil, kecukupan program ini sudah cukup memuaskan namun keterlambatan pembayaran menjadi hambatan, responsifitas masyarakat sangat baik dan merasa puas, perataan pengawasan tidak dapat dijangkau bila mengawasi semua wilayah Desa Toapaya dan dana juga tidak dapat di setarakan, ketepatan program dirasakan tepat dan memuaskan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis berikan saran yaitu, saat pembuatan proposal hendaknya mengutamakan kelompok usaha yang real, kepada kelompok peminjam agar menggunakan dana untuk modal usaha dan harus mengembangkan usaha. Ada baiknya bila BPUPK tidak terfokus ke laporan pengawasan UPK saja tapi menyambangi kelompok-kelompok SPP.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pemberdayaan, Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).

Latar Belakang Masalah

Krisis Ekonomi yang dialami Indonesia berawal sejak tahun 1997, realita yang terjadi saat itu membawa dampak buruk perekonomian Indonesia. Masyarakat yang miskin semakin miskin ditambah pemerintahan orde baru mewarisi hutang luar negeri yang diketahui setelah Pemerintah Orde Baru lengser dari kedudukannya.

Kemiskinan menghambat majunya sebuah bangsa, hal ini yang terjadi di Indonesia dalam keadaan yang krisis masyarakat Indonesia semakin sulit untuk bangkit. Peristiwa ini banyak terjadi pada masyarakat pedesaan sehingga masyarakat pedesaan tidak mempunyai kemampuan untuk membangun potensi dirinya dan wilayah pedesaannya meskipun didukung oleh sumber daya yang cukup melimpah.

Penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan Nasional dari dulu hingga sekarang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dirancang dan dilaksanakan. Dalam pelaksanaan fungsi pemerintah di bidang pembangunan, maka tugas pemerintah antara lain adalah melayani, mengayomi, menumbuhkan dan mengembangkan prakarsa masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota yang sekarang diganti oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Salah satu urusan wajib tersebut mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat, melalui PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Artinya pemerintah terkait harus berperan aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat Desa Toapaya agar target kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Berdasarkan bahan Petunjuk Teknik Operasional PNPM 2009 Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM program nasional yang berwujud kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM mandiri dilaksanakan melalui pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program penyediaan, pendampingan dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. (PNPM-Mandiri.Org.id, 10 Februari 2015, 18:21)

Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelola pembangunan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan memiliki tujuan khusus yaitu meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipasi dengan mendayagunakan sumber lokal.

Program kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) berfungsi sebagai kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan penanggulangan rumah tangga miskin.

Tujuan khusus dari program Simpan Pinjam Perempuan yaitu mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan, serta mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Perkembangan dan kesejahteraan Kabupaten Bintan dapat diukur dari garis kemiskinan, berdasarkan hasil penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bintan persentase tahun 2011 6.04% namun di tahun 2012 Kabupaten Bintan mengalami kenaikan angka kemiskinannya menjadi 6.29%, kemudian pada tahun 2013 terjadi pengurangan walaupun tidak begitu *signifikan* yaitu 6.23%.

PNPM Mandiri perdesaan di Desa Toapaya Selatan pertama kali diluncurkan pada tahun 2009, penanggulangan kemiskinan di Desa Toapaya Selatan melalui SPP bukan satu-satunya program penanggulangan kemiskinan, tetapi melalui program ini Pemerintah berupaya untuk mengurangi kemiskinan khususnya wilayah pedesaan. Seperti desa lainnya Desa Toapaya selatan juga melaksanakan kebijakan Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) tersebut namun tidak berpengaruh banyak untuk kehidupan ekonomi masyarakatnya. Serta tidak terlalu memberikan dampak baik yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setiap tahunnya. Berdasarkan data profil desa tahun 2013 pada pra *survey* penelitian yang merupakan arsip kantor desa Toapaya Selatan jumlah penduduk yang belum bekerja cukup besar mencapai 1.204 jiwa sedangkan yang mengurus rumahtangga 1.131 jiwa

dari 4.986 jiwa total penduduk Desa Toapaya selatan. Banyaknya angka pengangguran dan pengurus rumah tangga memicu penulis untuk meneliti program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP).

Tabel 1.1
Laporan Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan
Desa Toapaya Selatan Tahun 2011-2014

No.	Tahun	Kelompok	Nominal Dana Pencairan
1.	2011	19	Rp. 345.500.000
2.	2012	10	Rp. 275.000.000
3.	2013	16	Rp. 458.500.000
4.	2014	18	Rp. 577.500.000

Sumber: Arsip Kantor Camat Toapaya, Kabupaten Bintan

Dapat dilihat dari tabel bahwa setiap tahun bahwa ada peningkatan jumlah nominal pencairan, ini disebabkan adanya tingkat kebutuhan dari peminjam. Penulis melandasi penelitian ini dengan penelitian Dewi Anggraini sebuah skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Untuk Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (Studi di Dusun Task ombang, Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah). Bahwa hasil penelitian Dewi Anggraini mengatakan kegiatan SPP hanya pemberiaan permodalan saja tidak adanya pendampingan dan pengawasan.

Sehubungan dengan evaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui simpan pinjam kelompok perempuan Daerah Kabupaten Bintan, penulis telah melakukan pra penelitian dan penelitian untuk memperoleh data yang menunjang pelaksanaan penelitian lebih lanjut. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa pegawai yang menjalankan program tersebut dan masyarakat yang mengikuti program tersebut pada bulan juli 2015 di Kantor Camat Toapaya dan di lingkungan pemukiman masyarakat wilayah bagian Desa Toapaya Selatan, dengan hasil wawancara yang telah penulis amati berbagai gejala sebagai berikut:

1. Belum begitu terlihatnya dampak dari pelaksanaan program simpan pinjam kelompok perempuan bagi perekonomian masyarakat.
2. Minimnya sosialisasi tentang program pemberian simpan pinjam tersebut
3. Tidak meratanya pengawasan program tersebut kepada individu atau kelompok yang menerima pinjaman tersebut
4. Hasil yang dirasakan program SPP sangat membantu, meskipun dampaknya masyarakat terbelenggu hutang, karena tidak adanya pendampingan sehingga anggota kelompok SPP ada yang menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang peneliti temukan dilapangan sebagaimana uraian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dan dibuat dalam suatu penelitian dengan judul: “ **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN DI DESA TOAPAYA SELATAN KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013.**

a. LANDASAN TEORI

Kebijakan

Suatu kebijakan dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak. Menurut James Anderson dalam Leo Agustino (2012:7), definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making*, “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Telah diketahui adanya pelaksanaan program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Toapaya Selatan yang diikuti oleh kelompok kaum perempuan dan pelaksanaannya diatur oleh pihak pemerintah sebagai permodalan usaha.

Kebijakan menurut Carl Friedrich dalam Leo Agustino (2012:7), adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam

suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Berdasarkan teori diatas dalam kegiatan Simpan Pinjam memang diakui sangat membantu mencukupi ekonomi keluarga.

b. Evaluasi Kebijakan

Menurut Arikunto dan Safruddin (2010:2) yang mengatakan bahwa “evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Menurut Lester dan Steward dalam Leo Agustino (2012:185) menyebutkan, evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Kemudian William Dunn (608:2003) mengemukakan bahwa ada beberapa manfaat evaluasi yaitu sebagai berikut:

“Evaluasi dalam arti yang lebih spesifik *evaluasi* berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi”

c. Program

Menurut Arikunto (1997:1) mengatakan bahwa “Program adalah suatu rencana yang harus dilaksanakan, program ini merupakan sederetan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan”. Sedangkan menurut Hasibuan (2001:100) menyatakan “program adalah suatu rencana konkrit. Disebut konkrit karena dalam program sudah tercantum baik itu sasaran, kebijakan, prosedur, waktu maupun anggarannya. Jadi program juga merupakan usaha-usaha untuk mengefektifitaskan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidang masing-masing”.

d. Pemberdayaan

Suatu program agar berjalan dengan efektif tentu perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, namun pemerintah juga perlu memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan diri secara mandiri.

“Widjaja (2010:169) mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabat secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.”

e. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

Berdasarkan Bahan Bacaan Penjelasan Petunjuk Teknis operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (dalam Nurkolis, Skripsi 2014) dijelaskan bahwa Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

1. Tujuan dan Ketentuan

- a) Tujuan umum, secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam kelompok perdesaan, kemudian akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.
- b) Tujuan Khusus, mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2005:1), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan, Propinsi Kepulauan Riau.

3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang sangat penting dalam mengungkapkan permasalahan ini yang di peroleh dari penelitian langsung ke lapangan serta hasil wawancara dengan petugas maupun masyarakat berkaitan langsung dengan evaluasi kebijakan pelaksanaan program SPP di Desa Toapaya Selatan. Yang menjadi data primer adalah hasil wawancara informan dengan melihat kejadian dan peristiwa dan situasi sosial yang berkaitan dengan focus penelitian. Tempat dan Peristiwa dalam penelitian ini terdapat di wilayah Simpangan Kampung 16 khususnya RW 01 dan RW 02.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berupa data yang sudah diolah dan diperoleh dari kantor/instansi yang terkait dengan penelitian, data sekunder dapat berupa Dokumen sebagai sumber data lainnya yang bersifat melengkapi data utama yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian. Data ini dipergunakan untuk melengkapi

hasil wawancara dan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa. Dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain;

- 1) Profil Desa Toapaya Selatan
- 2) Data Laporan Siklus Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Toapaya Tahun 2009-2012
- 3) Laporan Perguliran Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan Desa Toapaya Selatan Tahun 2011-2014
- 4) Dan Lain-lain

Karakteristik Informan

Menurut Amirin dalam bukunya Menyusun Rencana Penelitian (1988:135) subjek penelitian merupakan orang-orang yang menjadi sumber informasi dan dapat diberikan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian, subjek ialah sumber informasi dan data serta masukan-masukan dalam menjawab masalah penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi teknik informannya ialah teknik *cluster*. Arikunto (2010) mengatakan sampel kelompok atau *cluster sample* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kelompok yang telah ditentukan. Namun dalam penelitian ini penulis akan membagi informan menjadi 2 cluster yaitu beberapa informan dari kelompok Simpan Pinjam dan pengurus PNPM-Mandiri Pedesaan di Desa Toapaya Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengamatan, dalam mengumpulkan data tahap ini mengarahkan peneliti untuk mengamati fenomena yang terjadi, penulis langsung mendatangi lokasi penelitian yaitu Desa Toapaya Selatan dan Kecamatan dan melakukan pengamatan, kemudian penulis melakukan pencatatan dari hasil melihat dan mengamati secara langsung

dilapangan, pengamatan sangat berguna karena menggambarkan kegiatan dan peristiwa.

2. Wawancara, merupakan percakapan langsung dengan maksud memperkuat data sekunder dalam penelitian. Menurut Moleong (2004:135), Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Responden*). Dalam tahapan ini peneliti memberi pertanyaan terstruktur. Dimana pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan. Peneliti mewawancarai pengurus PNPM Kecamatan Toapaya Kepala Desa dan Ibu-ibu Kelompok Simpan Pinjam (SPP).
3. Dokumentasi, setiap peristiwa yang dilakukan peneliti penting untuk diabadikan untuk memperkuat hasil pengamatan dilapangan. Tahap dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk catatan dokumen yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Pada teknik dokumentasi ini akan diperoleh data yang lebih lengkap, yang tidak diperoleh pada teknik wawancara dan observasi. Pada Tahap ini peneliti memiliki Dokumentasi laporan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bulan Oktober November Desember tahun 2013 kemudian laporan Siklus dan Perguliran serta dokumentasi dalam bentuk foto saat mewawancarai.

5. Alat Pengumpulan Data

Moleong (2004:4) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data utama. Dalam penelitian ini Peneliti secara langsung berada di lokasi penelitian dan melakukan pengamatan dan pencatatan data di lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti sendiri yang berfungsi sebagai instrument penelitisan. Fungsi pen eliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang *valid* dan *reliable*. Peneliti secara langsung hadir ke lokasi penelitian dan melakukan

penelitian serta pencatatan terhadap data atau informasi dilapangan. Sebelum mengadakan penelitian dilapangan, peneliti sudah terlebih dahulu mempersiapkan dan membekali diri dengan kemampuan melakukakn pengamatan dan pengetahuan tentang latar (*setting*) dan lapangan (*field*) pada lokasi penelitian. Penelitian ini di pandu dengan pedoman-pedoman yang telah dipersiapkan oleh alat-alat pengumpul data yang lainnya.

6. Teknik Analisa Data

Menurut Patilima (2007:88) menyebutkan bahwa pada analisa data kualitatif, peneliti membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum. Winarno (1982:134) juga mengatakan data yang sudah berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan dilapangan.

Untuk menganalisa data hanya bersifat memaparkan hasil wawancara yang didapatkan dari pelaksanaan program kegiatan Simpan Pinjam kelompok Perempuan di Desa Toapaya Selatan. Jadi dalam analisis deskriptif kualitatif ini peneliti tidak menggunakan peralatan matematis atau teknik statistic sebagai alat bantu analisis, tetapi hanya menggunakan penjelasan secara deskriptif tentang apa yang ditanyakan kepada informan.

ANALISA DATA

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN DI DESA TOAPAYA SELATAN KECAMATAN TOAPAYA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2013

A. Efektifitas

Efektifitas yaitu berkenaan dengan apakah suatu hasil yang diharapkan dapat dicapai. Efektifitas menurut Mustafa (2007:3) merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang

tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektifitas ini ditujukan untuk melihat pelaksanaan pengawasan dan dampak. Adapun indikator dari efektifitas yaitu:

1. Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Toapaya Selatan

Dari pendapat informan penyelenggara dan anggota kelompok diatas yang menjawab dapat peneliti menganalisa kegiatan Simpan Pinjam yang dilaksanakan oleh penyelenggara PNPM-Mandiri Pedesaan didesa Toapaya Selatan sudah melakukan verifikasi dengan baik, memberi sosialisasi kepada kelompok untuk menjaga aturan simpan pinjam agar tetap berjalan baik, serta memantau buku pinjaman kelompok secara berkala tetapi masih ada anggota kelompok yang terlambat mengembalikan pinjaman meskipun ditutup dengan uang kas tanggung renteng.

2. Dampak Ekonomi Masyarakat terhadap Program Simpan Pinjam

Peneliti dapat menganalisa lagi bahwa Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Toapaya Selatan sudah cukup membantu ibu-ibu dalam mengatasi berbagai masalah perekonomian dalam rumah tangga. Tetapi masih belum mencapai tujuan yang hakiki yaitu sebagai modal usaha yang akan membantu dalam meningkatkan kualitas ekonomi.

B. Efisiensi

Efisiensi menurut Dunn (430:2003) yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang berakhir pada umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi ini ditujukan untuk melihat sosialisasi pendampingan dan koordinasi kerja.

1. Pemberian Sosialisasi Pendampingan Pembinaan dan Pengawasan kepada masyarakat mengenai Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

Peneliti dapat menganalisa pengadaan Sosialisasi dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sedangkan Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) hanya berperan dalam hal pengawasan saja. pendampingan tidak dilakukan oleh Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) melainkan KPMD. Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) hanya memeriksa laporan pengawasan dari UPK.

2. Koordinasi atau kerjasama yang jelas antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

Peneliti dapat menganalisa bahwa komunikasi antara BKAD UPK dan BPUPK sejauh ini sangat baik karena adanya koordinasi yang kuat antara lembaga tersebut. Namun ada baiknya jika BPUPK tidak berpatokan pada laporan yang dihasilkan UPK saja, mengevaluasi kembali turun langsung kemasyarakat akan mendapatkan gambaran jelas dampak program tersebut.

C. Kecukupan

kecukupan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh tingkat efektifitas memuaskan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Dalam hal kecukupan maka peneliti akan mengaitkan subteori ini dengan kendala-kendala dan strategi dalam pelaksanaan program simpan pinjam kelompok perempuan (SPP).

1. Kendala-Kendala dan Hambatan-Hambatan yang muncul dalam Program Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

Peneliti menganalisa bahwa terkadang kegiatan ini tidak selalunya berjalan baik. masih rendahnya pengawasan terhadap anggota kelompok sehingga terciptanya perekonomian yang baik dimasyarakat.

2. Strategi Memaksimalkan Kesejahteraan Redistribusi Kelompok Peminjam

Menurut peneliti pengawasan dari BUMDes tidak diperlukan dalam Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) karena BUMDes hanya berperan dalam usaha-usaha personal yang dibuat serta ditujukan dalam menambah pendapatan desa saja.

D. Responsivitas

Responsivitas yaitu berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok yang berbeda. Terkait responsivitas maka peneliti menghubungkan pada kepuasan dan kebutuhan masyarakat.

3. Kepuasan masyarakat terhadap Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan terhadap kebutuhan dan preferensi

Berdasarkan pernyataan informan peneliti dapat menganalisa bahwa ibu-ibu yang mengikuti simpan pinjam karena memang sudah terbiasa meminjam dengan rentenir namun sejak adanya Simpan Pinjam Kelompok Perempuan ibu-ibu lebih tertarik dengan Simpan Pinjam.

2. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan memuaskan bagi Kelompok Peminjam

Biasanya dalam sebuah kebijakan ada beberapa masalah yang akan timbul mungkin saja ada *point-point* yang harus ditiadakan, ada yang mesti ditambah dan masih banyak kemungkinan lainnya. Bermutunya sebuah kebijakan akan dirasakan oleh penerima kebijakan tersebut. Dalam hal ini jika sesuatu kebijakan berjalan maka ada *input* yang dapat mempengaruhi dan bisa saja *me-reshuffle* kebijakan tersebut sumber *input* tersebut dari saran-saran yang masuk melalui masyarakat. Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sangat memuaskan, karena bunganya yang kecil.

Ibu-ibu yang mengikuti program Simpan Pinjam sangat merasa puas dengan adanya program tersebut karena menurut mereka program tersebut dapat membantu mereka yang disebabkan bunganya yang kecil dan pengembaliannya yang mudah dan tidak terburu-buru.

B. Perataan

Perataan yaitu berkenaan dengan biaya dan manfaat didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang berbeda. Sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah merata keseluruhan masyarakat. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan bagian dari program kebijakan pemerintah pusat. Maka perlu adanya pemerataan kebijakan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas perekonomian dimasyarakat. Pada poin perataan peneliti akan menegaskan tentang kesetaraan dana dan perataan pengawasan.

1. Kesetaraan Dana Pinjaman kepada Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

program kegiatan SPP di Toapaya Selatan sangat merata karena kecamatan yang sudah mengatur segala urusan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Tetapi dalam hal peminjaman dana yang dipinjamkan tidaklah sama rata.

2. Pengawasan yang merata pada Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

Peneliti melihat dan menganalisa tampak bahwa adanya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) secara berkala mengenai tepat waktunya membayar pinjaman. Menghubungkan jawaban wawancara yang dikemukakan oleh Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) dan Kelompok Wirausaha bahwa pengawasan memang selalu diadakan agar kelancaran pembayaran selalu terjaga. Namun perlu diperhatikan, jika adanya pengawasan pada mengenai pembayaran mesti ada yang harus di perbaiki dari sebuah program yakni kesejahteraan maka dari itu penting untuk dilakukan pengawasan dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat menengah kebawah.

F. Ketepatan

Ketepatan yaitu berkenaan dengan hasil (tujuan) yang diinginkan berguna bagi masyarakat.

Simpan Pinjam dirasakan memuaskan Rumah Tangga Miskin (RTM)

Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan sangat memuaskan bagi Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) dan Kelompok Masyarakat ini disebabkan adanya pengawasan yang dilakukan secara berkala ketepatan waktu dalam mengembalikan pinjaman. Namun perlu adanya peningkatan secara langsung kepada masyarakat mengenai kesejahteraannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dengan informan serta wawancara dengan Ketua Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) serta ibu-ibu Ketua dan Anggota Kelompok Wirausaha, Merpati, Anggrek, Al Hidayah maka penulis menyimpulkan bahwa evaluasi tentang program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di Desa Toapaya Selatan Tahun 2013. Maka dapat disimpulkan dengan menggunakan teori menurut Dunn (610:2003) mengenai evaluasi kebijakan dari enam dimensi terdiri dari efektifitas, efisiensi, kecukupan perataan, responsivitas dan ketepatan.

1. Hasil tanggapan dari informan berdasarkan dimensi efektifitas bahwa program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan oleh pemerintah pusat yang dijalankan oleh kecamatan Toapaya belum sepenuhnya terlaksana. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) sudah melakukan tugasnya dengan baik. Namun masih banyak anggota yang mengikuti simpan pinjam tidak terus menjalani usaha mereka.
2. Hasil tanggapan informan berdasarkan dimensi efisiensi bahwa strategi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang dijalankan oleh kecamatan Toapaya cukup baik karena sosialisasi sebelum

mengikuti program kegiatan sudah dilakukan secara baik dan pengawasan Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) terhadap Unit Pengelola Kegiatan (UPK) beserta kelompok dilakukan secara berkala. Reward dan Sanksi juga sudah ada dalam peraturan program ini. Serta PNPM Kecamatan Toapaya yang dijalani oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) dan Kelompok SPP sudah melakukan koordinasi agar program kegiatan dapat berjalan baik sebagaimana mestinya.

3. Hasil tanggapan dari informan berdasarkan dimensi kecukupan bahwa kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sangat berguna bagi masyarakat khususnya yang mengikuti program tersebut. Namun perlu diperhatikan tentang hambatan yang terjadi dilapangan seperti terlambat dalam mengembalikan pinjaman yang di tanggung oleh uang kas, mengingat banyak anggota yang tidak memiliki usaha yang jelas karena banyak yang menganggap usaha sebatas formalitas saja dan hal lain kendala disebabkan oleh perekonomian yang rendah di desa Toapaya Selatan karena banyak masyarakat yang hanya bekerja mengolah kebun.
4. Hasil tanggapan dari informan dimensi responsivitas bahwa masyarakat sangat merasakan manfaat dan kegunaannya dari program tersebut seperti terbantu dari dana pinjaman untuk modal usaha ada juga yang menggunakan dana untuk keperluan sehari-hari dan keperluan sekolah anak. Masih kurangnya pemahaman pada masyarakat dalam menggunakan dana simpan pinjam yang secara aturan digunakan untuk menambah modal usaha agar ada putaran keuangan yang akan dirasakan sebagai manfaat yang sebenarnya.

5. Hasil tanggapan dari informan dimensi perataan bahwa dalam pendanaan tidak mesti setiap anggota mendapat dana yang sama, karena peraturan dalam simpan pinjam anggota yang sudah pernah mengikuti dan tepat waktu dalam mengembalikan pinjaman akan diberi penambahan dana sebagai reward yang mendukung agar program dapat diminati masyarakat. Tetapi untuk anggota yang baru saja mengikuti program ini belum bias mendapatkan dana pencairan yang sama dengan anggota lainnya. Mengenai masalah pengawasan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bertanggungjawab mengawasi jalannya program kegiatan, Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) bertanggungjawab mengawasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Namun Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) bersama-sama mengawasi jalannya SPP tetapi pengawasan dilakukan hanya sebatas pengecekan buku kas dan kartu-kartu pinjaman anggota.
6. Hasil tanggapan dari informan dimensi ketepatan bahwa memang program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) oleh pemerintah pusat yang dijalani oleh kecamatan Toapaya sangat memuaskan anggota yang mengikuti kegiatan, masyarakat khususnya anggota Simpan Pinjam menganggap bahwa adanya program ini akan membantu meningkatkan perekonomian. Meskipun banyak hal yang harus diperbaiki dalam penerapan, pengawasan dalam mengevaluasi program.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa hal yang dapat peneliti sarankan, yaitu:

1. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) hendaknya perlu memperhatikan saat membuat proposal untuk anggota

masyarakat yang akan mengikuti SPP tahun selanjutnya agar mengutamakan calon anggota yang memiliki usaha yang real. Bila mengutamakan usaha yang real pada calon anggota kelompok maka program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) akan lebih berjalan baik karena ada perputaran modal dari dana pinjaman tersebut.

2. Badan Kerjasama Antar Desa BKAD, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) hendaknya jika memberikan pendampingan dalam permodalan usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan program agar masyarakat menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha yang jika di teruskan usaha akan meningkatkan kualitas ekonomi bagi masyarakat.
3. Kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pemeriksa Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Aparat Pemerintah Desa hendaknya menumbuhkan pemikiran bahwa penting membuat suatu usaha untuk ibu-ibu rumah tangga di perdesaan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan seperti membuat sebuah kerajinan kain bekas, kerajinan kain flanel, kerajinan dari plastic bekas, dan lain-lain. Mendaur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi kembali. Kemudian diterapkan dengan modal pinjaman dari dana pencairan SPP.
4. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Badan Pengelola Unit Pengelola Kegiatan BPUPK hendaknya mengajak ibu-ibu rumah tangga yang keluarganya termasuk dalam ekonomi rendah untuk mengikuti dan menekuni program tersebut sehingga program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) sehingga menjadi usaha yang sukses agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga.

Badan Pengelola Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) hendaknya tidak terfokus pada laporan dari UPK saja, ada baiknya jika Badan Pengelola Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK) menyesuaikan hasil laporan dengan realita yang terjadi dilapangan. Karena masih banyaknya anggota yang menganggap bahwa membuat suatu usaha ialah sekedar formalitas saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Amirin, Tatang. 1988. Menyusun Rencana Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Dunn, William, N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. 1999. Gajah Mada University Press: Yogyakarta
- Effendi, Khasan. 2010. Memadukan Metode Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Jones, Charles. 1998. Pengantar Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nawawi, Hadari. 2007 Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik: Formulasi, implementasi, Evaluasi. Jakarta: PT.Gramedia
- Moleong, Lesa, J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Soemardi. 1992. Pengantar Administrasi Pemerintahan. Bandung: STKS
- Sugiono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Refika Aditama
- Surakhmad, Winarno. 1982. Pengantar Metode Penelitian. Bandung: Tarsito.
- Soetarto, Endriatmo. & Martua, Sihaloho. Pembangunan Masyarakat Desa. Jakarta: Universitas Terbuka
- Patilima, Hamid. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Mandiri Perdesaan. 2009. Departemen Dalam Negeri:
Jakarta

Petunjuk Teknis Operasional PNPM-Mandiri Perdesaan. 2013. Departemen Dalam Negeri:
Jakarta

Wibawa, Samodra. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Widjaja, HAW. 2010. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh. Jakarta:
Rajawali Pers

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dokumen:

Profil Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Tahun 2013

Laporan Progres Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan
Kecamatan Toapaya dari tahun 2009 sampai April 2015

Laporan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan Desa Toapaya
Selatan dari tahun 2009 sampai April 2015

BPS, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bintan. Bintan Dalam Angka 2014.
Kabupaten Bintan

Skripsi dan Jurnal:

Nurcholis. 2014. Pelaksanaa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perdesaan Di Desa Bukit Harapan Kecamatan Lingga Utara, Kabupaten Lingga
Tahun 2013.

Dewi Anggraini. 2013. Pemberdayaan Perempuan Melalui Simpan Pinjam Untuk Perempuan
(SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (Studi di
Dusun Taskombang, Desa Taskombang, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten
Klaten, Jawa Tengah)

Juria. 2013. Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Kabupaten Bintan (Studi Kasus Pengembangan Usaha Mikro Tahun 2012)

Yuni Arti. 2015. Evaluasi Tentang Program Keindahan Di Taman Budaya Raja Ali Haji Kelurahan Senggarang Tahun 2014

Web:

<http://www.pnpm-mandiri.org>

<http://pnpmperdesaan.org>